

## **BKPEKDT: Ambil Alih Proyek Asahan**

Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT) meminta pemerintah pusat agar mengajukan opsi pengambilalihan Proyek Asahan dari Jepang, saat perundingan dimulai tahun 2010 mendatang. Proyek Asahan merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam bentuk dua pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium, PT Indonesia Asahan Aluminium, yang mulai dibangun sejak tahun 1978.

Saat ini, 12 perusahaan penanaman modal asal Jepang masih menguasai mayoritas saham Proyek Asahan. Kerja sama Proyek Asahan akan berakhir pada tahun 2013. Saat itu, pemerintah Indonesia sudah berhak menguasai sepenuhnya Proyek Asahan. Namun sebelum kerja sama tersebut berakhir, akan digelar pembicaraan bilateral antara Indonesia dengan Jepang mengenai kelanjutan Proyek Asahan tersebut.

“Kalau dari Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT) jelas menginginkan agar pemerintah pusat mengambil alih Proyek Asahan sepenuhnya,” ujar Ketua Badan Pelaksana BKPEKDT Edward Simanjuntak di Medan, Senin (10/8).

BKPEKDT merupakan lembaga bentukan Pemprov Sumut bersama dengan 9 kabupaten yang terkait langsung dengan kawasan ekosistem Danau Toba.

Menurut Edward, pengambilalihan Proyek Asahan sepenuhnya oleh pemerintah jelas lebih memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dibanding tetap melanjutkan kerja sama dengan Jepang. Bahkan lanjut Edward, sekali pun kerja sama tersebut mengubah porsi kepemilikan saham Proyek Asahan, dengan Indonesia menjadi mayoritas, tetap saja jauh lebih menguntungkan jika dikelola sendiri oleh pemerintah.

Edward mengungkapkan, jika dua PLTA di Proyek Asahan, yakni PLTA Tangga (324,4 megawatts) dan PLTA Siguragura (292,8 megawatts) listriknya dijual ke PLN, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12 triliun pertahun. “Kalau pemerintah daerah dapat 10 persen saja dari nilai keuntungan penjualan listrik tersebut, kami sudah dapat Rp 1,2 triliun

per tahun,â€ ujarnya.

Namun jika Indonesia memilih opsi mengambil alih Proyek Asahan sepenuhnya, maka pemerintah harus mengganti rugi nilai buku proyek tersebut pada tahun 2013. Menurut Kepala Badan Otorita Asahan Effendi Sirait, berdasarkan perhitungan lembaganya, nilai buku Proyek Asahan pada tahun 2009 saja mencapai 450 juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 45 triliun. Badan Otorita Asahan merupakan lembaga penghubung antara pemerintah Indonesia dengan pihak Jepang.

Edward mengungkapkan, saat ini BKPEKDT tengah membicarakan pembentukan tim negosiasi yang akan mendukung upaya perundingan pemerintah dengan Jepang tahun 2010. â€œKami sedang mengusulkan pembentukan tim karena pembicaraan mengenai kelanjutan Proyek Asahan sudah harus dimulai tahun 2010,â€ kata Edward.

Mantan Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemprov Sumut ini juga menuturkan, saat ini berkembang tiga wacana terkait masa depan kerja sama pemerintah dengan Jepang dalam Proyek Asahan. â€œSelain opsi mengambil alih sepenuhnya, ada juga opsi tetap melanjutkan kerja sama dengan Jepang, namun mengubah porsi kepemilikan saham, serta opsi yang masih menunggu perkembangan lebih lanjut atau wait and see dulu,â€ katanya.

Saat ini, keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah di Sumut dari Proyek Asahan adalah annual fee yang diberikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebesar Rp 74 miliar pertahun. Jumlah tersebut selain diberikan ke Pemprov Sumut juga harus dibagi ke sembilan kabupaten lainnya.

.indosat {font: bold italic 12px Tahoma;}

**BIL**